

OPINI WARGA JAKARTA PUSAT MENJELANG PEMILU 2024: ANALISIS ROBERT J. SCHREITER

Public Opinion in Central Jakarta Ahead of the 2024 General Election: A Robert J. Schreiter Analysis

Achmad Rizki Edinbur; Raden Cahyo Prabowo

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Bung Karno

Abstract: *This study examines the opinions of Central Jakarta residents ahead of Indonesia's 2024 general election. It uses a qualitative descriptive approach within a post-positivist paradigm and applies Robert J. Schreiter's view of analysis as reading texts by placing signs, interactions, and messages in a dynamic relationship. Data were collected through direct observation, in-depth interviews, and a literature review, then assessed through source triangulation. The findings show that residents evaluated political parties and candidates through perceived performance, proximity to citizens, responsiveness to public aspirations, integrity, transparency, and commitment to public welfare. Interviewees also criticized unfulfilled promises, group-oriented interests, and one-way political communication. Their opinions should be understood as expectations expressed in 2021 rather than as verified predictions of the 2024 election result. The study concludes that public trust is shaped by the consistency between political messages, observable performance, and dialogic engagement with citizens.*

Keywords: Public opinion; Political communication; 2024 election; Central Jakarta residents; Robert J. Schreiter

Abstrak: Penelitian ini mengkaji opini warga Jakarta Pusat menjelang Pemilu 2024. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam paradigma post-positivisme serta pandangan Robert J. Schreiter mengenai analisis sebagai pembacaan teks dengan menempatkan tanda, interaksi, dan pesan dalam hubungan yang dinamis. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi pustaka, kemudian diperiksa melalui triangulasi sumber. Temuan menunjukkan bahwa warga menilai partai politik dan calon berdasarkan persepsi atas kinerja, kedekatan dengan masyarakat, respons terhadap aspirasi publik, integritas, transparansi, dan keberpihakan pada kesejahteraan rakyat. Informan juga mengkritik janji yang tidak ditepati, kepentingan kelompok, dan komunikasi politik satu arah. Opini tersebut merupakan harapan yang disampaikan pada 2021, bukan verifikasi hasil Pemilu 2024. Penelitian menyimpulkan bahwa kepercayaan publik dibentuk oleh konsistensi antara pesan politik, kinerja yang dapat diamati, dan keterlibatan dialogis dengan warga.

Kata Kunci: Opini publik; Komunikasi politik; Pemilu 2024; Warga Jakarta Pusat; Robert J. Schreiter

1. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan mekanisme demokratis untuk mengakumulasi kehendak masyarakat, memilih pemimpin, dan membentuk keterwakilan politik. Dalam proses tersebut, warga tidak hanya bertindak sebagai pemilih, tetapi juga menilai pesan, rekam jejak, program, dan orientasi para peserta pemilu. Penilaian yang dinyatakan melalui percakapan, media, maupun tindakan sosial membentuk opini publik yang dapat memengaruhi legitimasi politik.

Jakarta Pusat memiliki posisi penting sebagai wilayah administratif sekaligus ruang pertemuan lembaga pemerintahan, aktivitas ekonomi, media, dan kelompok masyarakat. Keterbukaan informasi dan perkembangan media digital memperluas kesempatan warga untuk menyampaikan aspirasi serta menilai kinerja pemerintah dan partai politik. Dalam konteks menjelang Pemilu 2024, opini warga menjadi penting untuk memahami harapan terhadap partai, calon legislatif, dan calon pemimpin.

Opini publik merupakan hasil interaksi antarp individu dalam suatu publik, bukan sekadar penjumlahan pendapat pribadi (William Albig dalam Sastropetro, 1990: 52). Opini perlu dinyatakan agar dapat masuk ke dalam proses komunikasi dan dinilai sebagai opini aktual. Karena itu, penelitian ini menempatkan pernyataan warga sebagai teks sosial yang memuat penilaian, harapan, dan kritik terhadap proses politik.

Penelitian bertujuan mengidentifikasi tema utama dalam opini warga Jakarta Pusat menjelang Pemilu 2024 dan menjelaskan hubungan antara pesan politik, persepsi kinerja, serta kepercayaan publik. Analisis dilakukan dengan menggunakan pandangan Robert J. Schreiter mengenai pembacaan teks dalam hubungan dinamis antara tanda, interaksi, dan pesan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Analisis Robert J. Schreiter

Schreiter (1991) memandang analisis sebagai kegiatan membaca teks dengan menempatkan tanda-tanda dalam interaksi yang dinamis dan memperhatikan pesan yang disampaikan. Pendekatan ini termasuk dalam tradisi sosiokultural karena

pemaknaan tidak dipahami sebagai proses individual yang terisolasi, melainkan dibentuk melalui hubungan sosial, jaringan tanda, dan konteks kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian ini, pernyataan warga diperlakukan sebagai teks sosial. Kata-kata seperti pro-rakyat, kerja nyata, transparan, amanah, dan janji palsu bukan hanya pilihan bahasa, tetapi tanda evaluatif yang menghubungkan pengalaman warga dengan citra partai atau calon. Analisis tidak digunakan untuk mengesahkan pilihan politik tertentu, melainkan untuk mengurai pola pemaknaan yang muncul dalam wawancara.

2.2. Opini Publik

Opini adalah tanggapan terbuka terhadap persoalan yang dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, maupun melalui perilaku. Sastropoetro (1990: 1) menjelaskan pendapat sebagai hasil interaksi dan pemikiran manusia mengenai suatu hal yang kemudian dinyatakan. Leonard W. Doob menghubungkan opini publik dengan sikap pribadi atau kelompok yang sebagian dibentuk oleh pengalaman dalam kelompok (dalam Sastropoetro, 1990: 71).

Pergeseran opini dipengaruhi faktor psikologis, sosiologi-politik, budaya, dan media massa (Panuju dalam Olii, 2011: 18). Hennesy menambahkan lima unsur pemicu opini publik, yaitu keberadaan isu, ciri publik yang berkepentingan, pilihan yang kompleks, pernyataan preferensi, dan jumlah orang yang terlibat (dalam Olii, 2011: 22). Kerangka tersebut membantu menjelaskan mengapa penilaian terhadap peserta pemilu berkembang melalui pengalaman, identitas sosial, paparan media, dan diskusi publik.

2.3. Komunikasi Politik dan Pemilu

Komunikasi politik menghubungkan aktor politik, lembaga, media, dan warga dalam pertukaran pesan mengenai kepentingan publik. Dalam pemilu, partai dan kandidat menawarkan visi, misi, program, serta citra kinerja, sedangkan warga menafsirkan dan menilai pesan tersebut berdasarkan pengalaman mereka. Pemilu yang demokratis harus kompetitif, berkala, inklusif, dan definitif sehingga mampu membentuk kekuasaan yang sah serta keterwakilan politik.

3. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam paradigma post-positivisme. Paradigma ini mengakui keberadaan realitas sosial, tetapi memandang pemahaman peneliti terhadap realitas selalu terbatas dan perlu diperiksa melalui keterlibatan dengan objek, penggunaan beragam sumber, serta pengendalian subjektivitas (Salim, 2001; 2006).

Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan warga Jakarta Pusat. Panduan wawancara digunakan untuk menjaga keteraturan topik sekaligus memberi ruang bagi tema baru yang muncul selama percakapan. Data sekunder diperoleh dari buku, dokumen, media daring, dan sumber lain yang berkaitan dengan opini publik, politik, pemilu, dan kewarganegaraan.

Analisis dilakukan dengan memilah pernyataan wawancara, mengelompokkan tema, dan membaca hubungan antara tanda evaluatif, konteks interaksi, serta pesan politik. Kredibilitas data diperiksa melalui triangulasi sumber. Sumber asli tidak mencantumkan jumlah informan secara tegas; karena itu, artikel ini tidak menyajikan klaim kuantitatif atau generalisasi statistik mengenai seluruh warga Jakarta Pusat.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Tema Opini Warga

Wawancara memperlihatkan bahwa opini warga berpusat pada penilaian terhadap kinerja partai dan calon, kedekatan dengan masyarakat, kemampuan menyerap aspirasi, integritas, serta orientasi pada kesejahteraan publik. Sebagian informan menyatakan preferensi kepada PDI Perjuangan dan menyebut partai lain seperti Gerindra, Demokrat, Golkar, NasDem, Perindo, dan PKS. Penyebutan tersebut harus dibaca sebagai preferensi warga pada saat penelitian dilakukan, bukan sebagai hasil atau prediksi yang telah terbukti.

Tabel 1: Tema Opini Warga Menjelang Pemilu 2024

Tema	Tanda atau Pernyataan	Makna Analitis
Kinerja	Kerja nyata, pemenuhan janji, dan hasil yang dapat diamati.	Kinerja menjadi dasar penilaian kepercayaan.
Kedekatan	Pro-rakyat, merakyat, dan mendengar aspirasi.	Warga mengharapkan hubungan dialogis dengan partai dan calon.
Integritas	Jujur, amanah, bertanggung jawab, dan bebas korupsi.	Integritas dipahami sebagai syarat kelayakan wakil rakyat.
Tata kelola	Akuntabel, transparan, profesional, dan terbuka.	Keterbukaan digunakan untuk menilai konsistensi pesan dan tindakan.
Kritik	Janji palsu, kepentingan kelompok, dan komunikasi satu arah.	Kekecewaan muncul ketika pesan tidak didukung bukti kerja.

Sumber: hasil pengelompokan data wawancara dalam naskah sumber.

Tanda pro-rakyat dan wong cilik digunakan informan untuk menyatakan kedekatan simbolik antara partai dan masyarakat. Sebaliknya, ungkapan janji palsu dan omong doang menjadi tanda kekecewaan terhadap komunikasi politik yang tidak diikuti kinerja. Dalam kerangka Schreiter, kedua kelompok tanda tersebut memperoleh makna melalui pengalaman warga dalam menilai tindakan pemerintah, partai, dan calon.

4.2. Kinerja, Kepercayaan, dan Representasi

Kepercayaan politik dalam temuan ini tidak berdiri sendiri. Warga menghubungkannya dengan kinerja yang terlihat, pemenuhan janji, keterbukaan, dan kemampuan memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Harapan terhadap calon legislatif mencakup kejujuran, amanah, kewibawaan, tanggung jawab, kecerdasan, dan kesediaan mendengar kelompok rentan maupun warga di wilayah terpencil.

Opini tersebut memperlihatkan fungsi kognitif dan identifikasi dari opini publik. Warga menggunakan pengalaman serta informasi yang mereka terima untuk memahami peserta pemilu, lalu menghubungkan diri dengan citra atau nilai yang dinilai sesuai dengan kepentingan mereka. Proses identifikasi dapat memperkuat dukungan, tetapi juga dapat berubah ketika pesan politik tidak konsisten dengan pengalaman yang diamati.

4.3. Kritik terhadap Komunikasi Politik

Informan mengkritik politik yang berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok, janji yang tidak ditepati, dan komunikasi satu arah. Mereka mengharapkan dialog yang memberi ruang bagi aspirasi serta bukti kerja yang dapat dinilai. Kritik ini menunjukkan bahwa publik tidak hanya menerima pesan, tetapi menafsirkan, membandingkan, dan menguji pesan tersebut terhadap pengalaman sosial.

Media dan jejaring komunikasi memperluas sirkulasi penilaian politik. Namun, keterbukaan tersebut juga menuntut kecermatan karena opini dapat dipengaruhi pengalaman pribadi, identitas kelompok, budaya, dan selektivitas media. Karena sumber tidak menyediakan distribusi demografis atau jumlah informan, temuan perlu dipahami sebagai gambaran kualitatif atas tema opini yang muncul, bukan representasi seluruh pemilih Jakarta Pusat.

4.4. Pemilu sebagai Mekanisme Demokratis

Pemilu dipahami warga sebagai sarana memilih pemimpin dan menilai keterwakilan politik. Secara normatif, pemilu bukan sekadar ritual pergantian kekuasaan, tetapi mekanisme untuk membentuk otoritas yang sah dan memberi ruang bagi aspirasi rakyat. Karena itu, kualitas pemilu juga bergantung pada kualitas informasi, akuntabilitas peserta, kebebasan menyatakan pendapat, dan kemampuan warga menilai alternatif politik secara kritis.

4.5. Faktor Pembentukan Opini Politik

Perbedaan penilaian warga dapat dijelaskan melalui faktor psikologis, sosiologi-politik, budaya, dan media. Faktor psikologis membuat individu memberi makna berbeda terhadap rangsangan politik yang sama. Faktor sosiologi-politik menghubungkan opini dengan posisi sosial, keterlibatan dalam peristiwa, citra kekuasaan, dan kepentingan kelompok. Faktor budaya menyediakan nilai yang digunakan untuk menilai tindakan politik, sedangkan media membentuk lingkungan informasi tempat pesan dipilih, disebarkan, dan ditafsirkan.

Dalam data penelitian, kinerja dan kedekatan dengan rakyat menjadi kriteria yang berulang. Kriteria tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengalaman warga terhadap kebijakan, pelayanan, kondisi ekonomi, serta komunikasi para aktor politik. Karena pengalaman tiap warga tidak sama, dukungan kepada partai atau calon juga dapat berubah ketika informasi baru atau pengalaman baru mengubah penilaian sebelumnya.

Opini politik juga memiliki dimensi partisipatif. Kebebasan menyatakan pendapat memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan evaluasi, sedangkan pemilu menyediakan mekanisme untuk mengubah evaluasi tersebut menjadi pilihan politik. Agar partisipasi bermakna, warga memerlukan informasi yang cukup, kesempatan berdialog, dan kemampuan membedakan antara program yang dapat diperiksa dan slogan yang hanya membangun citra.

Temuan memperlihatkan bahwa komunikasi dialogis menjadi jembatan antara opini dan representasi. Ketika partai atau calon mendengar aspirasi, menjelaskan program, serta mempertanggungjawabkan hasil, warga memiliki dasar yang lebih kuat untuk membentuk kepercayaan. Sebaliknya, komunikasi yang hanya hadir menjelang pemilu memperbesar jarak antara pesan politik dan pengalaman sehari-hari masyarakat.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

Opini warga Jakarta Pusat menjelang Pemilu 2024 dibentuk oleh hubungan antara pesan politik dan pengalaman mereka dalam menilai kinerja. Tema dominan meliputi keberpihakan kepada rakyat, kerja nyata, penyerapan aspirasi, integritas, transparansi, dan kesejahteraan. Preferensi terhadap partai tertentu muncul bersama penilaian tersebut, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai prediksi hasil pemilu.

Analisis Schreiter menunjukkan bahwa tanda evaluatif memperoleh makna melalui interaksi sosial. Istilah positif seperti pro-rakyat, amanah, dan kerja nyata membangun citra kepercayaan, sedangkan istilah negatif seperti janji palsu

dan kepentingan kelompok menandai kekecewaan. Kepercayaan publik dengan demikian bergantung pada konsistensi antara pesan, tindakan, dan pengalaman warga.

5.2. Rekomendasi

Partai politik dan calon perlu membangun komunikasi dua arah, menyampaikan program secara terukur, membuka ruang evaluasi, dan menunjukkan kinerja yang dapat diverifikasi. Warga perlu menilai peserta pemilu berdasarkan rekam jejak, program, integritas, serta komitmen terhadap kepentingan publik, bukan hanya kedekatan simbolik atau slogan.

Penelitian berikutnya perlu menjelaskan jumlah dan karakteristik informan, prosedur pemilihan informan, waktu wawancara, serta bukti kutipan secara lebih rinci. Cakupan wilayah dan variasi kelompok warga juga perlu diperluas agar hubungan antara opini, identitas sosial, paparan media, dan pilihan politik dapat dianalisis secara lebih kuat.

Daftar Pustaka

- Abdullah. 2001. *Press Relation*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Budiardjo, Miriam. 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cetakan ke-7. Jakarta: Gramedia.
- Gaffar, Afan. 2005. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidajat, Imam. 2009. *Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press.
- Kriyantono, Rachmat. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Koesnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih. 1988. *Ilmu Negara*. Cetakan ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nimmo, Dan. 2001. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noer, Deliar. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Olii, Helena dan Novi Erlita. 2011. *Opini Publik*. Jakarta: Indeks.
- Salim, Agus. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sastropetro, Santoso. 1990. *Pendapat Publik, Pendapat Umum dan Pendapat Khalayak dalam Komunikasi Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Schreiter, Robert J. 1991. *Constructing Local Theologies*. Diterjemahkan oleh Stephen Suleeman. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Seta, Basri. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Indie Book Corner.
- Suseno, Franz Magnis. 1999. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. *Pengertian, Fungsi, dan Sistem Pemilihan Umum*. Diakses September 2021.
- Universitas Islam Riau. *Bahan Kajian Opini Publik*. Repositori Universitas Islam Riau. Diakses 9 September 2021.
- Universitas Atma Jaya Yogyakarta. *Bahan Kajian Opini Publik*. Repositori Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diakses 9 September 2021.
- Universitas Quality. *Bahan Kajian Politik dan Opini Publik*. Repositori Universitas Quality. Diakses 12 Agustus 2021.

